

MANEGER NASUTION, Komisioner Komnas HAM

# Keluarga Siyono Masih Didatangi Oknum Tertentu, Semacam Intimidasi-lah...

Kematian Siyono, terduga teroris yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyisakan pertanyaan. Keluarga menduga kematiannya tidak wajar dan meminta penjelasan.

KOMISIONER Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution yang terjun langsung mengungkap kematian Siyono menyatakan, keluarga almarhum meminta dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya.

"Kapolrinya kan sudah mempersilakan, dan itu patut kita apresiasi. Karena dia mempersilakan, maka Komnas HAM berkoordinasi dengan Muhammadiyah karena ada permintaan dari keluarga," ucap Maneger saat berbincang dengan *Rakyat Merdeka*, kemarin. Berikut wawancara selengkapnya.

## Bagaimana perkembangan kasus kematian Siyono?

Keluarga almarhum Siyono, melalui istrinya sudah memberi mandat ke Komnas HAM untuk menyetujui dilakukan otopsi. Lalu istri almarhum juga menunjuk dan memberi kuasa ke Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menjadi

kuasa hukum juga. Kita koordinasi antara Komnas HAM dengan PP Muhammadiyah. Bagaimana teknis permintaan keluarga untuk melakukan otopsi tersebut.

## Kenapa harus dilakukan otopsi?

Begitu, Kapolri kan sudah mempersilakan, dan itu patut kita apresiasi. Karena dia mempersilakan, maka Komnas HAM berkoordinasi dengan Muhammadiyah karena ada permintaan dari keluarga. Itu yang tadi kami bicarakan.

## Istri almarhum Siyono menyerahkan uang kepada PP Muhammadiyah?

Itu diserahkan ke kuasa hukum, yakni PP Muhammadiyah. Jadi kita nggak tahu isinya apa, atau (kalau misalkan uang, kita nggak tahu) jumlahnya berapa.

## Kapan rencana otopsi?

Soal waktu belum bisa dipas-

tikan kapan. Tapi memang sudah ada kesepakatan karena ada permintaan dari keluarga.

## Apakah akan menuntut Kepolisian?

Kalau itu sudah rencana tindak lanjut. Yang paling penting sekarang itu, Kapolri sudah mempersilakan untuk melakukan otopsi supaya terang benderang, ya kita apresiasi. Karena supaya kasus ini terang benderang, sesuai dengan permintaan keluarga. Nah soal kapannya, itu belum bisa dipastikan.

## Temuan Komnas HAM, apa pelanggaran yang diduga dilakukan aparat?

Pertama penjelasan dari teman-teman Kepolisian kan karena kelelahan akibat berkelahi dengan anggota Densus 88. Kemudian diralat, menjadi salah prosedur dan lain sebagainya.

## Maksudnya?

Ya artinya, publik tidak dapat informasi yang akurat, yang jelas. Demikian juga keluarga. Padahal keluarga punya hak untuk mendapatkan informasi. Salah satu hak keluarga

terhadap kematian Siyono, tahu penyebab kematian dan seterusnya.

## Selain kematian yang janggal, apakah ada temuan pelanggaran lain, karena Siyono juga diduga tidak di-BAP?

Jadi kita sebetulnya *concern*-nya sekarang ini untuk memastikan penyebab kematian Siyono. Yang paling penting begini, ini kan sekarang dugaannya kematian almarhum ini janggal, atau tidak wajar. Itu dugaannya. Tidak wajarnya seperti apa, itu yang harus dibuktikan. Cara membuktikannya seperti apa, ya secara *scientific*, secara keilmuan itu dengan melakukan otopsi.

## Artinya memang harus menunggu otopsi?

Jadi begini, dari situ nanti kita punya pertimbangan keilmuan. Soal upaya hukum, nanti kuasa hukum yang akan mempertimbangkan. Kalau Komnas HAM melihatnya, ada *nggak* pelanggaran HAM di sini. Nah itulah nanti yang akan kita buat rekomendasi.

## Katanya keluarga kerap

## didatangi oknum tertentu?

Itu juga menjadi *concern* kita. Seperti yang kita sudah sampaikan, karena kita dapat laporan bahwa sampai terakhir ini keluarga masih didatangi oknum tertentu. Dengan didatangi oknum tertentu itu, artinya kan ini ada sesuatu semacam intimidasi-lah.

## Siapa yang melakukan intimidasi?

Nah itulah yang sedang kita lakukan, kita mengingatkan kepada negara itu harus menjamin rasa aman negara. Negara tidak boleh membiarkan warganya hidup dalam ketidakamanan, ketidaknyamanan, apalagi dalam rasa khawatir. Jadi itu yang kita ingatkan siapapun organ negara, supaya menjamin rasa aman keluarga almarhum.

Ini sebetulnya momentum untuk menjamin kehadiran negara melindungi hak dasar warga negaranya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diperlakukan manusiawi. Itu kan hak dasar dan *nggak* boleh dikurangi. Negara tidak boleh menghilangkan satu pun. Itu konteksnya. Nah keluarga tentu



punya hak untuk mengetahui kematian almarhum.

## Apakah Komnas HAM nantinya akan merekomendasikan untuk mengubah

## prosedur penangkapan terduga teroris oleh Densus 88?

Saya kira bergantung hasil otopsi itu. Hasilnya yang akan kita jadikan pertimbangan untuk membuat rekomendasi ya. ■ PYB